

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam suatu perusahaan adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Di tengah persaingan global yang semakin kompetitif, maka perusahaan saling meningkatkan daya saing di berbagai sektor untuk dapat menarik minat para investor untuk berinvestasi. Oleh karena itu, kinerja perusahaan harus ditingkatkan guna mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan, tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa depan (Ariantini, Yuniarta, & Sujana, 2017)[1].

Pengertian *corporate governance* menurut *Turnbull Report* di Inggris (April 1999) adalah sebagai berikut (Effendi, 2017)[2]:

”Corporate governance is a company’s system of internal control has as its principal aim the management of risks that are significant to the fulfilment of its business objectives, with a view to safeguarding the company’s assets and enhancing over time the value of the shareholders investment”

Berdasarkan pengertian di atas *Turnbull Report* mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang (Effendi, 2017)[2].

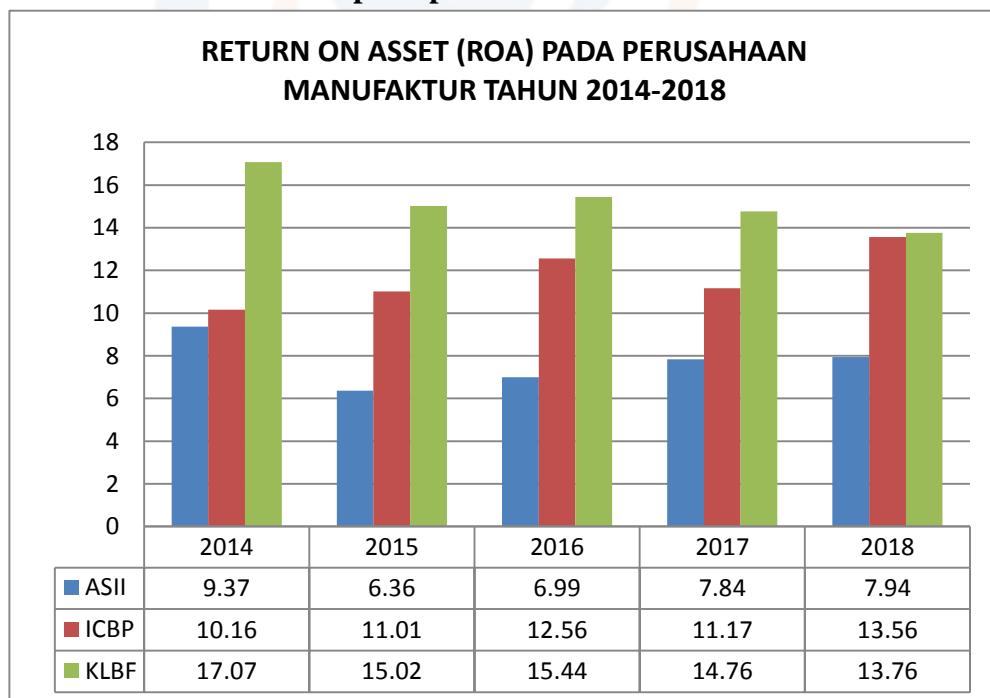
Menurut Dar, et al (2011) GCG adalah salah satu faktor penting dalam peningkatan kinerja perusahaan. Selain meningkatkan kinerja perusahaan, implementasi GCG membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja mereka dan menarik investor serta memungkinkan mereka untuk mewujudkan tujuan perusahaan, melindungi hak-hak pemegang saham, memenuhi persyaratan hukum, dan menunjukkan kepada masyarakat luas bagaimana mereka menjalankan bisnis mereka. *Corporate governance* yang baik (GCG) memberikan kontribusi untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan akses modal ke luar mereka (Sadasiha & Hadiprajitno, 2014)[3].

Perusahaan dituntut untuk melakukan perbaikan tata kelola guna meningkatkan kepercayaan investor baik domestik maupun asing yang disebut dengan *good corporate governance* (GCG). GCG merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pengelolaan dan kinerja perusahaan. GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan yang dapat memberikan informasi yang menarik minat para investor di pasar. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus memandang GCG sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan (Darmayani, 2013)[4].

Implementasi GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga perusahaan mampu meningkatkan nilai pemegang saham. Semakin tinggi nilai pemegang saham maka keputusan untuk berinvestasi di perusahaan akan semakin meningkat. Manfaat dari implementasi GCG dapat dirasakan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan yang menerapkan GCG dengan baik dan juga konsisten menjamin keberlangsungan operasional perusahaan dan kesejahteraan *stakeholders*.

Kinerja keuangan perusahaan ditentukan oleh sejauh mana keseriusan perusahaan dalam menerapkan GCG. Semakin serius perusahaan menerapkan GCG, maka kinerja keuangan perusahaan akan semakin meningkat (Hamdani, 2016)[5]. Pengukuran kinerja keuangan dalam perusahaan dilakukan untuk mengetahui apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan perencanaan. Dengan meningkatnya kinerja keuangan perusahaan berarti perusahaan dapat mencapai tujuan dari didirikannya perusahaan tersebut. Dalam informasi keuangan perusahaan digambarkan melalui laporan keuangan. Laporan keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba yaitu Return on Assets (ROA) (Sulistiani, 2018)[6]. Berikut ini merupakan data *return on asset* pada tiga perusahaan manufaktur di Indonesia:

Gambar 1.1 Grafik ROA pada perusahaan manufaktur tahun 2014-2018.



Sumber: Data yang diolah berdasarkan laporan keuangan, www.idx.co.id

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat disimpulkan bahwa perkembangan *return on asset* pada industri manufaktur cenderung fluktuatif. Pada PT. Astra International Tbk (ASII) mengalami penurunan pada tahun 2014-2015 dan mulai

mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai 2018. Perusahaan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) berfluktuasi sampai pada tahun 2017-2018 mencapai 013,56. Perusahaan PT. Kalbe Farma Tbk mengalami penurunan dari tahun 2014-2018. Persentase ROA memperlihatkan bahwa perkembangan kinerja perusahaan pada industri manufaktur cenderung fluktuatif.

Contoh kasus yang menjadi bukti bahwa penerapan GCG di Indonesia masih lemah adalah kasus pembangunan dan pemasaran kawasan permukiman raksasa Meikarta di kawasan Lippo Cikarang (Forumkeadilan, 2017)[7]. Dalam kasus ini PT. Lippo Cikarang Tbk (LPCK) gencar melakukan pembangunan dan pemasaran di kawasan permukiman raksasa Meikarta. Promosi, iklan, dan marketing Meikarta yang begitu masif, terstruktur, dan sistematis, telah memikat 20.000-an konsumen sementara izin resmi dan rekomendasi pemerintah Provinsi Jawa Barat belum diberikan.

Melihat banyaknya konsumen yang tertarik padahal izin resmi dan rekomendasi belum keluar menunjukkan bahwa perusahaan ini tidak transparan kepada konsumen. Dalam hal ini PT. Lippo Cikarang Tbk melanggar prinsip transparansi. Aktivitas operasional yang sudah dilakukan tanpa adanya perizinan merupakan kurangnya tanggung jawab yang dilakukan manajemen terhadap konsumen. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima sekurangnya 440 aduan terkait program nomor urut pesanan (*pre-project selling*) karena tidak adanya ketidakpastian dalam pembangunan gedung. Dalam hal ini PT. Lippo Cikarang Tbk melanggar prinsip akuntabilitas.

Pembangunan hunian Meikarta melanggar Peraturan Daerah Nomor 12/2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat. Perusahaan ini juga melanggar ketentuan Pasal 42 UU No. 20/2011, yang mewajibkan pengembang untuk memiliki jaminan atas kepastian peruntukan ruang; kepastian hak atas tanah; kepastian status penguasaan gedung; perizinan; dan jaminan pembangunan sebelum melakukan pemasaran. Dalam hal ini PT. Lippo Cikarang Tbk melanggar prinsip responsibilitas.

Kasus yang terjadi pada perusahaan ini dengan jelas menunjukkan bahwa seluruh pihak yang bekerja didalam proyek ini ikut terlibat dalam pelanggaran aturan yang ada untuk mementingkan kepentingan ekonomis pribadi. Dalam hal ini PT. Lippo Cikarang Tbk melanggar prinsip independensi. Warga yang berdekatan dengan pembangunan proyek tersebut mengungkapkan bahwa mereka merasa keberatan dengan adanya mega proyek ini karena menimbulkan kebisingan dan mengakibatkan rusaknya infrastruktur jalan. Proyek ini juga mengundang reaksi negatif dari para stakeholder. Dalam hal ini PT. Lippo Cikarang Tbk melanggar prinsip kewajaran.

Kasus ini menyebabkan penurunan kinerja keuangan perusahaan pada PT. Lippo Cikarang Tbk pada tahun 2016 sebesar 9,54% terjadi penurunan pada tahun 2017 menjadi 2,97%. Dengan jumlah anggota dewan direksi terjadi peningkatan dari 5 orang pada tahun 2017 menjadi 7 orang. Sementara jumlah anggota dewan

komisaris terjadi penurunan pada tahun 2016 dari 7 orang menurun menjadi 6 orang pada tahun 2017. Sementara jumlah komite audit pada tahun 2016 sampai tahun 2017 tetap 3 orang.

Pemerintah pada tahun 1999 membentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) melalui Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999. Lahirnya Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) merupakan produk dari krisis ekonomi yang melanda di Indonesia pada tahun 1998. KNKG dibentuk dengan berbagai maksud dan tujuan, salah satunya ialah untuk mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut KNKG, organ dan struktur tata kelola perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi (KNKG, 2006)[8].

Penelitian ini menggunakan *good corporate governance* sebagai variabel x. Variabel x yang pertama yaitu ukuran dewan direksi dengan menggunakan jumlah keseluruhan dewan direksi, karena dalam pengelolaan perusahaan dewan direksi berwenang dan bertanggung jawab secara langsung. Semakin tinggi jumlah dewan direksi maka kinerja keuangan perusahaan akan semakin meningkat. Variabel x yang kedua yaitu ukuran dewan komisaris. Semakin tinggi pengawasan yang dilakukan dewan komisaris terhadap kinerja dewan direksi maka strategi yang ditetapkan perusahaan dapat terjamin dan pengelolaan aset perusahaan yang dilakukan oleh manajemen puncak dapat diawasi dengan lebih baik. Variabel x yang ketiga yaitu ukuran komite audit. Ukuran komite audit mempengaruhi komunikasi antara dewan direksi, dewan komisaris, auditor internal, maupun auditor eksternal.

Pertama, dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola segala sumber yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi bertugas menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang sehingga kinerja perusahaan meningkat. Semakin banyak jumlah dewan direksi maka perusahaan dapat dikelola lebih baik lagi. (Rahmawati, Rikumahu, & Dillak, 2017)[9]. Semakin tinggi jumlah dewan direksi maka operasional perusahaan akan berjalan lebih baik lagi dan pengelolaan aset perusahaan akan semakin baik diikuti dengan integritas dan keahlian dari dewan direksi serta komitmen dalam pelaksanaan GCG. Perbandingan jumlah dewan direksi dengan ROA akan dijelaskan dihalaman berikutnya.

Tabel 1.1
Hubungan Jumlah Dewan Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan pada Industri Manufaktur tahun 2014-2018

PERUSAHAAN	TAHUN	JUMLAH DEWAN DIREKSI	RETURN ON ASSET
ICBP	2014	9	10,16
	2015	9	11,01
	2016	9	12,56
	2017	9	11,17
	2018	9	13,76
KLBF	2014	5	17,07
	2015	5	15,02
	2016	5	15,44
	2017	6	14,76
	2018	6	13,76
ASII	2014	9	9,37
	2015	10	6,36
	2016	11	6,99
	2017	9	7,84
	2018	10	7,94

Sumber: Data yang diolah berdasarkan laporan keuangan, www.idx.co.id

Berdasarkan data perbandingan Tabel 1.1, jumlah dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA) beberapa perusahaan manufaktur cenderung berfluktuatif. Jumlah dewan direksi PT. Astra Internasional Tbk (ASII) pada tahun 2014 sampai tahun 2018 cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2014 ROA PT. Astra Internasional Tbk mengalami kenaikan senilai 9,37 dengan jumlah dewan direksi 9 anggota tetapi pada tahun 2015 terjadi penurunan senilai 6,36 diikuti dengan kenaikan jumlah direksi. Pada tahun 2016 sampai tahun 2018 dengan jumlah anggota dewan direksi yang berfluktuatif, ROA semakin meningkat hingga mencapai 7,94. Berbeda dengan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), pada jumlah dewan direksi yang sama dari tahun ke tahun ROA perusahaan ini cenderung berfluktuatif. Pada PT. Kalbe Farma Tbk, jumlah dewan direksi dari tahun 2014 sampai tahun 2016 sama tetapi terjadi penurunan ROA dari 17,07 sampai 15,44. Pada tahun 2017 sampai tahun 2018 perusahaan ini menambahkan anggota dewan direksinya dengan total 6 anggota tetapi ROA semakin menurun sampai 13,76.

Penelitian yang dilakukan oleh Inge Andhitya Rahmawati, Brady Rikumahu, dan Vaya Juliana Dillak (2017)[9], menyatakan bahwa dewan direksi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diprosikan menggunakan ROA. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Rizka Arditya Putri (2018)[10] yang menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur menggunakan *cash flow return on asset* (CFROA).

Kedua, dewan komisaris diyakini memiliki peran penting dalam pengelolaan perusahaan, khususnya dalam memonitor manajemen puncak. Peranan dewan komisaris tersebut sangat diperlukan untuk membantu dalam pemeriksaan keuangan perusahaan yang diperlukan untuk mekanisme *corporate governance*. Fungsi dewan komisaris yang lain sesuai dengan yang dinyatakan dalam *National Code for Good Corporate Governance 2001* adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan kepentingan berbagai *stakeholder* perusahaan sebaik memonitor efektivitas pelaksanaan *corporate governance*. (Astuti dan Zuhrohtun, 2007 dalam Hendratni, dkk 2018)[11].

Dewan komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat untuk dewan direksi harus dijalankan dengan baik dan efektif. Dewan komisaris harus menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan profesional serta bertindak independen. Dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya harus mengutamakan kepentingan pemangku kepentingan perusahaan. Perusahaan yang mengutamakan kepentingan pemangku kepentingan akan mendapat kepercayaan baik dalam operasi maupun investasi. Berikut merupakan perbandingan jumlah dewan komisaris dengan ROA pada perusahaan manufaktur di Indonesia:

Tabel 1.2
Hubungan Jumlah Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Perusahaan pada Industri Manufaktur tahun 2014-2018

PERUSAHAAN	TAHUN	JUMLAH DEWAN KOMISARIS	RETURN ON ASSET
ASII	2014	11	9,37
	2015	11	6,36
	2016	12	6,99
	2017	13	7,84
	2018	10	7,94
ICBP	2014	7	10,16
	2015	6	11,01
	2016	6	12,56
	2017	6	11,17
	2018	6	13,76
KLBF	2014	6	17,07
	2015	7	15,02
	2016	7	15,44
	2017	7	14,76
	2018	6	13,76

Sumber: Data yang diolah berdasarkan laporan keuangan, www.idx.co.id

Berdasarkan data perbandingan Tabel 1.2, jumlah dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA) beberapa perusahaan manufaktur cenderung berfluktuatif. Perusahaan PT. Astra Internasional Tbk (ASII) pada tahun 2014-2015 dengan jumlah anggota dewan komisaris 11 orang mengalami penurunan ROA dari 9,37 ke 6,36. Di tahun 2016 jumlah anggota dewan komisaris bertambah menjadi 12 orang diikuti kenaikan persentase ROA sebesar 6,99. Hal yang sama terjadi pada tahun 2017, jumlah anggota dewan komisaris bertambah menjadi 13 orang diikuti oleh kenaikan ROA senilai 7,84 sementara pada tahun 2018 jumlah dewan direksi menurun menjadi 10 orang dengan ROA yang meningkat menjadi 7,94. Perusahaan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) pada tahun 2014 jumlah anggota 7 orang dengan ROA senilai 10,16. Dari tahun 2015 sampai tahun 2018 dengan jumlah anggota 6 orang ROA cenderung berfluktuatif. Perusahaan PT. Kalbe Farma Tbk (KLBF) pada tahun 2015 jumlah anggota dewan komisaris 6 orang dengan ROA senilai 17,07. Dengan jumlah anggota dewan direksi 7 orang ROA pada tahun 2015 mengalami penurunan senilai 15,02 diikuti kenaikan ROA pada tahun 2016 sampai tahun 2017. ROA paling rendah dialami perusahaan ini pada tahun 2018 dengan nilai 13,76 diikuti penurunan jumlah anggota dewan direksi 6 orang.

Penelitian yang dilakukan oleh Inge Andhitya Rahmawati, Brady Rikumahu, dan Vaya Juliana Dillak (2017)[9], menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur menggunakan ROA. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Aminar Sutra Dewi, Desfrian Sari, dan Henryanto Abaharis (2018)[12] yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Ketiga, Menurut Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Bagi pengelola perusahaan komite audit sangat penting karena tidak hanya sebagai sistem pengendalian perusahaan, namun dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam penanganan masalah pengendalian. Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui pengawasan atas proses termasuk sistem pengendalian internal dan penggunaan prinsip akuntansi berterima umum, dan mengawasi proses audit secara keseluruhan (Sulistiani, 2018)[6]. Komite audit berperan penting terhadap penerapan GCG karena proses penyusunan CG diawasi oleh komite audit. Kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang juga dan pelaporan pelaksanaan CG juga dipantau oleh komite audit.

Semakin tinggi jumlah komite audit, maka proses implementasi GCG dapat diawasi dengan baik. Dengan banyaknya jumlah komite audit, maka fungsi pengawasan dapat berjalan secara efektif sehingga mengurangi risiko terjadinya penyimpangan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang baik dapat menjadi

dasar yang relevan untuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh investor. Keputusan berinvestasi yang dilakukan investor karena adanya kepercayaan terhadap perusahaan yang menerapkan CG dengan baik akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Berikut merupakan perbandingan jumlah komite audit dengan ROA pada perusahaan manufaktur di Indonesia:

Tabel 1.3

Hubungan Jumlah Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur tahun 2014-2018

PERUSAHAAN	TAHUN	JUMLAH KOMITE AUDIT	RETURN ON ASSET
ASII	2014	4	9,37
	2015	4	6,36
	2016	4	6,99
	2017	4	7,84
	2018	4	7,94
ICBP	2014	3	10,16
	2015	3	11,01
	2016	3	12,56
	2017	3	11,17
	2018	3	13,76
KLBF	2014	3	17,07
	2015	3	15,02
	2016	3	15,44
	2017	3	14,76
	2018	3	13,76

Sumber: Data yang diolah berdasarkan laporan keuangan, www.idx.co.id

Berdasarkan data perbandingan Tabel 1.3 menunjukkan dengan jumlah komite audit yang sama persentase ROA beberapa perusahaan manufaktur cenderung berfluktuatif. Pada PT. Astra Internasional Tbk dengan jumlah komite audit 4 orang dari tahun 2014-2018 terdapat persentase ROA yang berfluktuatif. Hal yang sama terjadi pada PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan PT. Kalbe Farma Tbk.

Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Mustika Sari, Hiro Tugiman, dan Annisa Nurbaiti (2016)[13] menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Rizka Arditya Putri (2018)[10] yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, diketahui bahwa terdapat perbedaan yang menyimpulkan hasil pengaruh jumlah dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan, sehingga seberapa besar pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan masih belum jelas. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk menekankan melakukan pengujian kembali terhadap variabel tersebut dengan periode yang berbeda.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Inge Andhitya Rahmawati, Brady Rikumahu, dan Veya Juliana Dillak (2018)[9] yang berjudul “Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan”. Berbeda dari penelitian sebelumnya, peneliti berfokus kepada penerapan *good corporate governance* bisa mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini berfokus kepada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2018. Alasan peneliti menggunakan industri manufaktur sebagai sampel penelitian karena peneliti ingin menguji pengaruh tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) pada industri manufaktur sehingga dapat diketahui apakah jumlah dewan direksi, jumlah dewan komisaris, dan jumlah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur menggunakan aspek keuangan dengan rasio profitabilitas yaitu *return on assets* (ROA).

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang ada, maka penulis terdorong untuk melakukan pengujian kembali untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan, dengan mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2014-2018”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fenomena grafik ROA yang tidak stabil pada perusahaan manufaktur periode 2014-2018
2. Terjadi kenaikan dan penurunan jumlah organ perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan industri manufaktur pada tahun 2014-2018
3. Pertimbangan keputusan investasi oleh investor yang tidak memperhatikan implementasi GCG yang dapat dilihat dari masih banyaknya kasus pelanggaran GCG di Indonesia.

4. Ketidaksihesuaian konsep perusahaan manufaktur terhadap jumlah organ perusahaan pada tahun 2014-2018.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membatasi penelitian ini dengan berfokus kepada:

1. Peneliti hanya memfokuskan objek penelitian pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Periode tahun penelitian yang dipilih pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah tahun 2014-2018
3. Variabel independen *good corporate governance* membahas ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit.
4. Penelitian ini membahas variabel ukuran dewan direksi yang diukur dari jumlah anggota dewan direksi.
5. Penelitian ini membahas variabel ukuran dewan komisaris yang diukur dari jumlah anggota dewan komisaris.
6. Penelitian ini membahas variabel ukuran komite audit yang diukur dari jumlah anggota komite audit.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan perusahaan pada industri manufaktur periode tahun 2014-2018 ?
2. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan perusahaan pada industri manufaktur periode tahun 2014-2018 ?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan perusahaan pada industri manufaktur periode tahun 2014-2018 ?
4. Apakah ukuran komite audit berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan perusahaan pada industri manufaktur periode tahun 2014-2018 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran komite secara simultan terhadap kinerja keuangan perusahaan pada industri manufaktur periode tahun 2014-2018
2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan direksi secara parsial terhadap kinerja keuangan perusahaan pada industri manufaktur periode tahun 2014-2018

3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris secara parsial terhadap kinerja keuangan perusahaan pada industri manufaktur periode tahun 2014-2018
4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran komite audit secara parsial terhadap kinerja keuangan perusahaan pada industri manufaktur periode tahun 2014-2018

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang ingin diberikan penulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat teoritis

a) Bagi Masyarakat

Sebagai sarana menambah pengetahuan akuntansi, khususnya akuntansi manajemen dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh komposisi dewan komisaris, komposisi dewan direksi, dan ukuran komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan.

b) Peneliti berikutnya

Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini dan pembeding untuk menambah ilmu pengetahuan.

1.5.2 Manfaat praktis

a) Bagi perusahaan

Diharapkan dapat menjadi masukan dan dorongan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan GCG, sehingga dapat menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) untuk kelangsungan hidup perusahaan.

b) Bagi investor

Diharapkan dapat membantu menjadi masukan mengenai pentingnya penerapan GCG pada perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.

c) Bagi penulis

Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis mengenai penerapan GCG dan pengetahuan secara empiris mengenai pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan.